

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan, maka kesimpulan penelitian ini dikonstruksi berdasarkan perspektif Teori Manajemen George R. Terry. Teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan suatu proses manajemen tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterpaduan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan). Keempat indikator tersebut saling berkaitan dalam mendukung efektivitas strategi pemerintah untuk mewujudkan program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut :\

1. *Planning* (Perencanaan)

a. Penetapan Tujuan Program

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan tujuan program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi

angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Tujuan tersebut telah menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

b. Penentuan Sasaran

Pemerintah telah menyusun program berdasarkan data kemiskinan, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta usulan dari pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya perbedaan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah serta keterbatasan data yang menyebabkan belum seluruh program mampu menjangkau sasaran secara optimal.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

a. Pembagian Tugas

Setiap OPD yang terlibat telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pembagian tanggung jawab yang jelas memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sehingga setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

b. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, pemerintah desa, dan instansi terkait telah dilakukan melalui rapat koordinasi, Musrenbang, maupun forum evaluasi program. Akan tetapi, koordinasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian informasi, sinkronisasi data, dan integrasi program antarinstansi sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

3. *Actuatung* (Pelaksanaan)

a. Pelaksanaan Program

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, pendampingan kelompok usaha, serta berbagai bentuk fasilitasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin. Program-program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun hasilnya belum sepenuhnya merata.

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat telah terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap program, keterbatasan kemampuan usaha, serta kurangnya keberlanjutan pendampingan setelah bantuan diberikan

4. *Controlling* (Penggeraan)

a. Monitoring

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan.

b. Evaluasi Hasil

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan perbaikan program berikutnya. Namun, hasil evaluasi belum seluruhnya ditindaklanjuti secara optimal sehingga masih terdapat beberapa kendala yang berulang dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala serta mengintegrasikan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pelibatan masyarakat dan

pemerintah desa dalam proses perencanaan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga diharapkan memperkuat koordinasi antar-OPD sehingga tidak terjadi tumpang tindih program serta meningkatkan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Di sisi lain, hasil monitoring dan evaluasi hendaknya dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan program sehingga kebijakan pemberdayaan ekonomi pada tahun berikutnya menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, OPD perlu meningkatkan intensitas pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat penerima manfaat agar program yang dilaksanakan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap setiap program juga perlu dilakukan secara berkala sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan lebih aktif dalam mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menyampaikan usulan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat perannya dalam mendampingi masyarakat selama pelaksanaan program, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

4. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan program pemberdayaan ekonomi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bantuan, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan pemerintah hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan keterampilan sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kendala yang dihadapi agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis strategi pemerintah berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry, yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan

menggunakan teori atau pendekatan lain, seperti *collaborative governance*, pemberdayaan masyarakat, atau evaluasi kebijakan publik, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas program pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitian pada daerah lain atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat dibandingkan dengan kondisi di Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir. (2024). *PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI DESA NGUKEN KECAMATAN PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO*.
- Ana Kumalasari, B. T. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 133–145. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.840>
- Bojonegoro, P. (2024). *Tahun 2024, Jumlah Penduduk Miskin Bojonegoro Menurun 5.920 Jiwa*. Statiska Web. <https://bojonegorokab.go.id/berita/7994/tahun-2024-jumlah-penduduk-miskin-bojonegoro-menurun-5920-jiwa>
- Edi, S. (2009). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan. *Alfabeta, Bandung*.
- Fahmi, A. dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 249–259.
- Fauzan, A. (2018). *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri*.
- Gayatri, A. M., Mulyani, D., Zainuddin, D., Widjajanto, T., & Alamsyah, M. (2022). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Potensi Ketahanan Pangan Lokal Pada Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong Kabupaten Kebumen. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 234. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.15724>

- Gracenda Febina Br Purba, Dicky M.C. Sinulingga, Josua Togatorop, & Lokot Muda Harahap. (2025). Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan : Evaluasi Dari Berbagai Penelitian. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956>
- Hajra, S. (2022). *Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare(Perspektif Ekonomi Islam)*.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>
- Hamim, I. N. (2016). *MANAJEMEN PENGELOLAAN INFAQ DI LEMBAGA SOSIAL PESANTREN TEBUIRENG (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*. June.
- Handoko, T. H. (2022). *Manajemen edisi 2*.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3–12.
- Kurniyanto, I. R., Arifiyanti, N., & Destiarni, R. P. (2023). Strategi pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Desa Keleyan. *Agriscience*, 3(3), 699–709. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i3.19448>
- Manzila Armylia, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-2008. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 55–67.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH*

- (KOTAKU) DI KOTA BIMA (STUDI KASUS KECAMATAN RABA). 217130082, 6.
- Mohammad, Haikal, M. (2023). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI ACEH*. 15(2).
- MUALIFAH, N. (2019). *DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Oleh : NUR MUALIFAH Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1440 H / 2019 M*.
- Muliana, Nurbaiti, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Mutiara. (2021). *PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi*.
- Nada, S. U., & Kartika Sari, M. M. (2021). Strategi Kepala Desa Karangagung Dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Alun-Alun. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(2), 427–442. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n2.p427-442>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Pusat Statistik, B. (2025). Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2025. *Berita*

- Resmi Statistik*, 56, 1. <https://www.bps.go.id/id/infographic?id=1134>
- Rahmadani, P. (2021). *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA BIMA (STUDI KASUS KECAMATAN RABA)*. 4(1), 6.
- Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan Kemiskinan Untuk Mencapai SDGs: Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.345>
- Rohmadi, Doni Yusuf Bagaskara, & Indah Yuliana. (2024). Analisis SWOT Perkembangan Dana Haji di Indonesia : Studi Pendekatan NVivo dan Literatur Review. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 12(1), 97–114. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i1.1463>
- Sahara, L. (2023). Strategi Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Sosial-Politik Dan Kebijakan Publik. *IMF E Library*, 1–12.
- Setiawan, A., Amellia, N. W., Rokhmat, D. F., Terusan, J., Sudirman, J., & Barat, J. (2025). *Pelestarian Kearifan Lokal Di Kabupaten Purwakarta : Sebuah Upaya Strategis Pemerintah Daerah*. 13(November), 111–130.
- Setiawan, H., & Choirunnisa, C. (2023). Penyuluhan Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat di Desa Simpar Kabupaten Batang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.34312/ljpmt.v2i1.17638>
- Sholikin, A. (2024). *Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro*. 2(September), 175–185.

Statistik, B. P. (2024). *Persentase penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro pada Maret 2024 sebesar 11,69 persen*. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOJONEGORO.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.

Suprizal. (2019). STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS. *STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI DESA TELUK PULAI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS*, 1–9.

Terry, G. (2006). *Asas-Asas Manajemen*. www.penerbitwidina.com